

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian normatif dan empiris mengenai penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran baku mutu emisi kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Sleman belum memiliki mekanisme operasional untuk menjatuhkan sanksi administratif. Pelaksanaan uji emisi oleh DLH masih bersifat edukatif tanpa tindakan korektif, sedangkan dalam uji KIR yang dilakukan oleh Dishub, ketidaklulusan emisi hanya direspons dengan penundaan perbaikan selama 14 hari tanpa penjatuhan sanksi administratif. Dengan demikian, instrumen sanksi administratif belum berfungsi sebagai alat pengendalian pencemaran udara maupun pendorong kepatuhan terhadap baku mutu emisi.
2. DLH dan Dishub memiliki persepsi kewenangan yang saling tumpang tindih. DLH menilai pengawasan emisi berada dalam ranah operasional Dishub, sedangkan Dishub berpendapat bahwa

pengenaan sanksi merupakan tanggung jawab DLH. Ketiadaan peraturan pelaksana di tingkat kabupaten, seperti peraturan bupati atau petunjuk teknis mengenai tata cara pengawasan dan penjatuhan sanksi, menyebabkan norma pada tingkat undang-undang maupun peraturan daerah tidak dapat dijalankan. Selain itu, keterbatasan instrumen pengujian, sumber daya manusia, serta tidak adanya integrasi data antarinstansi menghambat efektivitas pengawasan. Kendala-kendala tersebut menyebabkan penegakan sanksi administratif belum mampu memberikan dampak kepatuhan terhadap pemenuhan baku mutu emisi kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menyusun peraturan pelaksana berupa Peraturan Bupati atau petunjuk teknis yang mengatur tata cara pengawasan, pengujian, dan mekanisme penjatuhan sanksi administratif atas pelanggaran baku mutu emisi. Pengaturan ini diperlukan agar sanksi administratif dapat dilaksanakan secara operasional dan efektif.
2. DLH dan Dishub Kabupaten Sleman perlu memperjelas pembagian kewenangan serta membangun koordinasi yang terintegrasi, termasuk

melalui pembentukan sistem data bersama dan prosedur kerja terpadu, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penegakan baku mutu emisi kendaraan bermotor.

3. Peningkatan kapasitas kelembagaan perlu dilakukan, antara lain dengan pengadaan alat uji emisi yang memadai, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta perluasan layanan uji emisi. Upaya ini penting untuk memastikan pengawasan emisi dapat dilakukan secara berkelanjutan dan menjadi dasar penegakan sanksi administratif yang efektif.
4. Pengawasan yang lebih intensif, dalam pengawasan yang intensif, dapat dilakukan pengawasan berkala dan terjadwal integrasi pengawasan bagi DLH dan Dishub. Pengawasan yang berkelanjutan, terkoordinasi antara DLH dan Dishub, berbasis data, serta diikuti dengan menjatuhkan administratif bertahap. Tanpa pengawasan yang intensif, sanksi administratif akan sulit diterapkan secara efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

### BUKU

Danusaputro, Munadjat. 1980. *Hukum Lingkungan dan Pembinaannya di Indonesia*. Binacipta, Bandung.

Emil Salim. 2010. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. LP3ES, Jakarta.

Husin, Sukanda. 2020. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Sinar Grafika, Jakarta.

Husin, Sukanda. 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.

Mertha Jaya, I Made Laut. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. QUADRAT, Yogyakarta.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat.

Rangkuti, Siti Sundari. 2000. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Airlangga University Press, Surabaya.

Suwartono. 2014. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Andi Offset, Yogyakarta.

Wardoyo, Arinto Yudi Ponco. 2016. *Emisi Partikulat Kendaraan Bermotor dan Dampak Kesehatan*. Universitas Brawijaya Press, Malang.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. CAPS, Yogyakarta.

## **SKRIPSI**

Rahayaan, Justina Angeliq Queny. 2023. *Peran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Dalam Pencegahan Pencemaran Udara Melalui Uji Emisi Sepeda Motor*. Skripsi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Setiadi, Amelia. 2023. *Pelaksanaan Uji Emisi Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Udara Akibat Kendaraan Bermotor di Daerah Khusus Ibukota Jakarta*. Skripsi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Setiawan, Marsha Regina. 2024. *Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Uji Emisi Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kabupaten Sleman*. Skripsi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

## JURNAL

Matthews, Samuel Yohenson Yoce & Suharta, I Nengah. 2020. "Pengaturan Modifikasi Kendaraan Bermotor di Indonesia." *Kertha Semaya*, Vol. VII No. 5, hlm. 709–721.

Lestari, Sri. 2021. "Analisis Pengaruh Transportasi terhadap Pencemaran Udara di Daerah Perkotaan." *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, Vol. 9 No. 2, hlm. 143.

Suhaedi, Edi & Sodikin. 2024. "Dasar Hukum Kewenangan Pemerintah dalam Penanggulangan Pencemaran Udara dari Kendaraan Bermotor." *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 8 No. 2.

Anggrainy, Rae & Safitri, Khansa Kamila. 2023. "Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 3 No. 1.

Rahmadanti, Dias & Subekti, Rahayu. "Penegakan Hukum Lingkungan melalui Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Limbah B3." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Undiksha*.

## INTERNET

Antara News. 2025. *Pemkab Sleman adakan uji emisi gratis mobil roda empat.* <https://jogja.antaranews.com/berita/742281/pemkab-sleman-adakan-uji-emisi-gratis-mobil-roda-empat-ini-lokasinya>. Diakses 20 November 2025.

Joglo News. 2025. *DLH Sleman gelar uji emisi gratis, tanpa sanksi bagi kendaraan yang tidak lolos.* <https://joglonews.com/2025/04/28/catat-tanggalnya-dlh-sleman-gelar-uji-emisi-kendaraan-gratis/>. Diakses 20 November 2025.

Radar Purworejo – Jawa Pos. 2024. *Januari–Maret, 372 kendaraan tidak lulus uji KIR di Sleman.* <https://radarpurworejo.jawapos.com/jogjakarta/2144557070/januari-maret-ada-372-kendaraan-tak-lolos-uji-kir-di-sleman>. Diakses 20 November 2025.

UGM. *UGM dan Dishub Sleman Gelar Uji Emisi Kendaraan.* <https://ugm.ac.id/id/berita/15692-ugm-dan-dishub-sleman-gelar-uji-emisi-kendaraan>. Diakses 1 April 2025.

Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). 2024. *UNY gelar uji emisi kendaraan bermotor; 80% kendaraan memenuhi baku mutu emisi.* <https://www.uny.ac.id/id/berita/universitas-negeri-yogyakarta-gelar-uji-emisi-bentuk-edukasi-lingkungan-lewat-aksi-nyata>. Diakses 20 November 2025.

Tribunnews Jogja. 2018. *Uji Emisi Gas Buang di Kampus UAJY.* [https://jogja.tribunnews.com/2018/02/21/uji-emisi-gas-buang-di-kampus-uajy?page=all#goog\\_rewarded](https://jogja.tribunnews.com/2018/02/21/uji-emisi-gas-buang-di-kampus-uajy?page=all#goog_rewarded). Diakses 11 April 2025.

BPS DIY. 2023. *Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kendaraan di D.I. Yogyakarta (unit) 2021–2023.*

<https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTg0IzE=/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kendaraan-di-d-i-yogyakarta-u>.

Diakses 11 April 2025.

Isuzu Indonesia. 2025. *Kenapa Uji KIR Itu Wajib? Ini Alasannya!*.

<https://isuzu-astra.com/kenapa-uji-kir-itu-wajib-ini-alasannya/>. Diakses 19

Oktober 2025.

## HASIL PENELITIAN

Bappenas. 2021. *Kajian Pengendalian Pencemaran Udara di Wilayah Perkotaan Indonesia*. Bappenas, Jakarta.

KLHK. 2020. *Laporan Inventarisasi Emisi Nasional Sektor Transportasi*. Jakarta.

KLHK. 2023. *Laporan Kualitas Udara Nasional 2022*. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara, Jakarta.

UNEP. 2019. *Air Pollution in Asia and the Pacific: Science-based Solutions*.

UNEP. 2022. *Vehicle Emissions and Air Quality: Global Overview Report*. Nairobi.

WHO. 2021. *Ambient Air Pollution: Health Impacts*.

WHO. 2021. *Ambient Air Pollution: A Global Assessment of Exposure and Burden of Disease*. WHO Press, Jenewa.

Hoek, G. 2013. "Long-term air pollution exposure and cardio-respiratory mortality." *Environmental Health Perspectives*.

## **WAWANCARA**

Wawancara dengan Sapandi, S.H., Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub Sleman, 9 Oktober 2025.

Wawancara dengan Sasikirana Dian Ekowati Sutarno, S.T., M.Sc., Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda DLH Sleman, 9 Oktober 2025.



## LAMPIRAN



Foto Bersama Bapak Sapandi, S.H., Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman



Foto Bersama Ibu Sasikirana Dian Ekowati Sutarno, S.T., M.Sc., Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Ketua Tim Kerja Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Lingkungan

19 September 2025

Kepada  
Yth. Ir. Arip Pramana, MT  
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman  
Jalan KRT. Pringgadiningrat,  
Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511  
Phone : (0274) 868772

Dengan hormat,

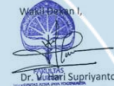
Sebagai salah satu dari proses pembelajaran bagi mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa setiap mahasiswa harus melakukan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi yang nantinya akan diujikan dalam ujian pendadaran di hadapan tim penguji internal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin riset/penelitian dan wawancara terkait dengan bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

1. Nama : Evelyn Kusuma
2. Nomor Mahasiswa : 210514317
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
4. Lokasi Riset : Sleman, Yogyakarta
5. Dosen Pembimbing I : FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.
6. Dosen Pembimbing II : PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN BAKU MUTU EMISI KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN SLEMAN
7. No. Handphone / WA : 0811-7996-438

Perlu kami sampaikan bahwa riset/penelitian/wawancara yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan internal fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan/dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

  
Widyadarmawan I,  
Dr. Vutari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Alamat  
Kampus I Gedung Allonsus  
Mizan Baru 28 Yogyakarta 55281  
URL  
<https://fth.unj.ac.id>

Kontak  
Telepon : +62-274-561031  
Fax : +62-274-547973  
Surel : fh@unj.ac.id



19 September 2025

Kepada  
Yth. Sri Restuti Nur Hidayah, ST, M.Eng  
Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup  
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman  
Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Sleman Jalan KRT Pringgadiningrat No.9 Beran, Beran Kidul,  
Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511

Dengan hormat,

Sebagai salah satu dari proses pembelajaran bagi mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa setiap mahasiswa harus melakukan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi yang nantinya akan diujikan dalam ujian pendadaran di hadapan tim penguji internal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin riset/penelitian dan wawancara bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

1. Nama : Evelyn Kusuma
2. Nomor Mahasiswa : 210514317
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
4. Lokasi Riset : Sleman, Yogyakarta
5. Dosen Pembimbing I : FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.
6. Dosen Pembimbing II : PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN BAKU MUTU EMISI KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN SLEMAN
7. No. Handphone / WA : 0811-7996-438

Perlu kami sampaikan bahwa riset/penelitian/wawancara yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan internal fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan/dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

  
Widyadarmawan I,  
Dr. Vutari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Alamat  
Kampus I Gedung Allonsus  
Mizan Baru 28 Yogyakarta 55281  
URL  
<https://fth.unj.ac.id>

Kontak  
Telepon : +62-274-561031  
Fax : +62-274-547973  
Surel : fh@unj.ac.id



